Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara
https://ejurnals.com/ojs/index.php/jikn

Volume 7, No. 3, September 2026

KOLABORASI KEPEMIMPINAN ANTARA KEPALA SEKOLAH DAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANADI SMKN 1 KUPANG

Maglon Ferdinand Banamtuan[1], Soleman Baun[2]
[1,2]Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Indonesia
machonope@gmail.com

ABSTRAK; Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yakni: 1). Untuk mengetahui kinerja Kepala Sekolah dalam mengembangkan sarana dan prasarana pendidik pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kupang; dan 2). Untuk mengetahui kinerja Komite Sekolah dalam mengembangkan sarana dan prasarana pendidik pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, yang mengarah pada penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini adalah: 1). Berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah meliputi: a). memikirkan dukungan dari pihak lain sehingga, keberlanjutan selanjutnya bisa berjalan dengan efektif dan efisien; b). Kepala sekolah sebagai pelaksana pengembangan sarana prasarana di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kupang hendaknya pandai menyediakan, merencanakan dan memfasilitasi; c). Pengendali pengembangan sarana prasarana di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kupang di mana kepala sekolah merupakan pemimpin pengendali puncak yang menentukan kunci keberhasilan sekolah untuk mencapai tujuan, serta pengendalian di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kupang merupakan proses untuk mengamati secara berkesinambungan pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi terhadap penyimpangan pengembangan sarana prasrana yang terjadi. Sedangkan yang berkaitan dengan kepemimpinan komite sekolah, meliputi: a). badan pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah; b). Badan pemberi dukungan (supporting agency) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah; c). Badan pengontrol (controlling agency) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah terwujud dalam keikutsertaan komite sekolah dalam rapat penyusunan Rencana Keuangan Asli Sekolah, melakukan pengecekan secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan selalu hadir terlibat langsung dalam proses penghapusan sarana dan prasarana; d). Mediator dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah; dan e). Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah tentu tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan utama yang dihadapi oleh komite sekolah dalam usaha meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yaitu masalah dana dan terbatasnya lahan yang dimiliki oleh sekolah.
Kata Kunci: Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kepemimpinan Komite Sekolah, Pengembangan Sarana Dan Prasarana Sekolah.

ABSTRACT; *The objectives to be achieved in this study, namely: 1). To find out the Principal's performance in developing facilities and infrastructure for educators at the State 1 Kupang Vocational High School; and 2). To find out the performance of the School Committee in developing the facilities and infrastructure of educators at the State 1 Kupang Vocational High School. This study uses a qualitative method approach, which leads to case study research.The results of this study are: 1). Regarding the leadership of the principal include: a). think of support from other parties so that further sustainability can be carried out effectively and efficiently; b). The principal as the implementer of infrastructure development at the State 1 Kupang Vocational High School should be good at providing, planning and facilitating; c). The controller of the development of infrastructure in the State 1 Vocational High School Kupang where the principal is the top controlling leader who determines the key to the success of the school to achieve the objectives, and control at the Kupang 1 State Vocational High School is a process to continuously observe the implementation of work plans that have been prepared make corrections to irregularities in the development of the pre-existing facilities that occurred. Whereas those relating to the leadership of the school committee include: a). advisory agency in managing school facilities and infrastructure; b). Supporting agency in the management of school facilities and facilities; c). The controlling agency in the management of school facilities and infrastructure was realized in the participation of the school committee in the Keuanan Asli School Plan drafting meeting, directly checking the condition of facilities and infrastructure in the school and always being directly involved in the process of eliminating facilities and infrastructure; d). Mediator in managing school facilities and infrastructure; and e). Improving the quality of school facilities and infrastructure certainly cannot be separated from the obstacles faced. The main obstacles faced by school committees in an effort to improve the quality of facilities and infrastructure are the problem of funds and the limited land owned by the school.*

Keywords: *Principal Leadership, School Committee Leadership, Development Of School Facilities And Infrastructure.*

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi dunia ditandai oleh perkembangan yang semakin cepat di segala bidang kegiatan, begitu pula dalam kegiatan pendidikan. Globalisasi ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia sehingga diperlukan

sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan pendidikan bagi warga negaranya tidak henti-hentinya melakukan berbagai kegiatan dan menyediakan fasilitas pendukungnya termasuk memberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Seperti yang Disampaikan dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan pendidikan Nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggeraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sumber daya manusia unggul merupakan persyaratan utama bagi terwujudnya bangsa dan negara yang maju. Berapapun besar sumber daya alam, modal sarana prasarana yang tersedia, pada akhirnya di tangan sumber daya manusia yang handal sajalah target pembangunan bangsa dan

negara dapat dicapai. Dalam perspektif berpikir seperti ini, suatu bangsa tak dapat mencapai kemajuan tanpa adanya suatu sistem pendidikan yang baik. Pendidikan adalah modal dasar untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul. Dunia pendidikan yang utama adalah sekolah. Sekolah merupakan salah satu lembaga alternatif pelayanan pendidikan. Sekolah sebagai suatu lembaga tentunya memiliki visi, misi, tujuan dan fungsi. Untuk mengemban misi, mewujudkan visi, mencapai tujuan, dan menjalankan fungsinya sekolah memerlukan tenaga profesional, tata kerja organisasi dan sumber-sumber yang mendukung baik finansial maupun non finansial.

Sekolah sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain serta berkontribusi pada pencapaian tujuan. Komponen-komponen tersebut adalah siswa, kurikulum, bahan ajar, guru, Kepala Sekolah, tenaga kependidikan lainnya, lingkungan, sarana, fasilitas, proses pembelajaran dan hasil atau output. Semua komponen tersebut harus berkembang sesuai tuntutan zaman dan perubahan lingkungan yang terjadi disekitarnya. Untuk berkembang tentunya harus ada proses perubahan. Pengembangan ini hendaknya bertolak dari hal-hal yang menyebabkan organisasi tersebut tidak dapat berfungsi dengan sebaik yang diharapkan (Gupta & Shingi, 2001). Dalam konsepsi pengembangan kelembagaan tercermin adanya upaya untuk memperkenalkan perubahan cara mengorganisasikan suatu lembaga, struktur, proses dan sistem lembaga yang bersangkutan sehingga lebih dapat memenuhi misinya. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada lembaga sekolah harus meliputi seluruh komponen yang ada di dalamnya.

Oleh karena itu, dalam Peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung oleh kemampuan manajerial yang efektif. Sukses tidaknya pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam mengelola setiap komponen sekolah. Kemampuan Kepala Sekolah dan mitranya tersebut berkaitan langsung dengan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap manajemen dan kepemimpinan, serta tugas yang dibebankan kepadanya. Kondisi tersebut menunjukkan visi dan misinya terletak pada bagaimana manajemen, khususnya dalam menggerakkan dan memperdayakan berbagai komponen sekolah.

Pihak Sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dalam mencapai tujuan sekolah atau lembaga pendidikan secara efektif

dan efesien. Seolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan pendididikan. Oleh karena itu, pihak sekolah dan Komite Sekolah berkewajiban mamahami visi, misi, tujuan, rumusan dan program-program yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik yang kelak menjawab akan kebutuhan masyarakat. Dengan perkataan ini antara pihak sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat dan masyarakat harus membina hubungan yang harmonis. Demi pencapaian tujuan dan program sekolah yang akan berdampak pada peningkatan mutu sekolah, khususnya mutu hasil belajar siswa. Jika hubungan pihak sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat berjalan dengan baik, maka rasa tanggung jawab dan partisipasi dari pihak-pihak yang terkait untuk memajukan sekolah akan tercapai sesuai tujuan dan program yang disepakati.

Secara yuridis, tuntutan keterlibatan masyarakat itu ditetapkan dalam Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002 tentang Komite Sekolah sebagai lembaga resmi yang menjadi mitra sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tujuan, peran dan fungsi Komite Sekolah telah di atur secara jelas dalam peraturan ini. Salah satu bunyi dari *point* tersebut adalah Komite Sekolah bekerjasama dengan Kepala Sekolah untuk mengelola pendidikan.

Penelitian ini difokuskan pada kolaborasi kepemimpinan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di SMKN 1 Kupang adapun yang menjadi dasar pemikiran dalam memilih SMKN 1 Kupang sebagai tempat penelitian, yakni: *Pertama,* SMKN 1 Kupang merupakan salah satu sekolah unggul di Kota Kupang, di tandai dengan berbagai prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. *Kedua,* ada banyak ekstrakurikuler di sekolah tersebut, meliputi: pramuka, tari (merupakan ekstrakurikuler wajib untuk semua siswa). *Ketiga,* prestasi akademik berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa tingkat kelulusan mencapai 100% dan semua melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi Negeri (Universitas Nusa Cendana dan Politeknik Negeri Kupang) yang sudah di akui kualitas *output*nya. *Keempat,* kondisi fisik bangunan dari tahun ke tahun sebagaimana yang ada dalam laporan program kerja tahunan ke tahun sebagaimana peneliti ke lokasi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, nampak seperti ruang laboratorium sains, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang seni, ruang perpustakaan semakin kondusif dengan berbagai

koleksi buku. *Kelima, output* SMKN 1 Kupang sudah dapat menciptakan lapangan kerja sendiri seperti menerima jahitan, membuka rumah makan, serta bekerja di hotel. Data tersebut belum diketahui dengan pasti, tetapi melalui komunikasi lulusan dengan lembaga pendidikan SMKN 1 Kupang dapat menjadi indikator relevansi *output* dengan kebutuhan masyarakat. *Keenam,* adanya kegiatan seperti pameran, lomba-lomba di lingkungan sekolah maupun di tempat lain menunjukkan bahwa SMKN 1 Kupang sudah *go* nasional bahkan *go* internasional yang tidak bisa diragukan lagi.

Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa Komite Sekolah SMKN 1 Kupang sudah menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002 tersebut. Maka hasil wawancara saat studi pada 3 Mei 2018, diperoleh dari Kepala Sekolah SMKN 1 Kupang dan Komite Sekolah memang sudah bekerja dan berjalan sesuai dengan tugas pokok masing-masing, tetapi belum maksimal. Masih terkesan saling menunggu dan masih kaku dalam mengeksekusi permasalahan di sekolah. Memang sampai saat ini belum berdampak pada pencapaian mutu sekolah/mutu proses dan hasil pembelajaran kerjasama yang dilakukan antara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah belum maksimal/optimal karena berbagai kendala. Model kerjasama antara dua lembaga ini belum terbentuk secara sempurna. Belum adanya model ideal dalam melakukan kerjasama Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah ini menjadi faktor penghambat, selain faktor lain. Kenyataan ini menunjukkan pentingnya memberi pemahaman serta keterampilan kepada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah agar bisa menjalankan tugas secara sempurna. Dengan harapan, kedua lembaga ini bisa bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga program mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat cepat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan sebuah rumusan permasalahan tentang 1). Bagaimana kepemimpinan Kepala Sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidik pada SMKN 1 Kupang?; dan 2). Bagaimana kepemimpinan Komite Sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidik pada SMKN 1 Kupang?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, yang mengarah pada penelitian studi kasus. Menurut Salim (2001: 93) Studi kasus adalah suatu pendekatan

untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu kasus (*case*) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya suatu intervensi dari pihak lain. Dalam penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang kolaborasi kepemimpinan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam mengembangkan sarana dan prasarana di sekolah. Hal ini sesuai dengan pengertian kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan peda metodologi yang diselidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, (Sugiyono, 2010: 8). Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mengambil data yang akan diteliti berdasarkan pertimbangan tertentu (khususnya jarak tempuh) yang dianggap mewakili representatif judul dalam masalah penelitian yang dalam hal ini akan dilaksanakan pada SMKN 1 Kupang, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan kepala sekolah SMKN 1 Kupang dalam pengembangan sarana dan prasarana

Peranan kepala sekolah dalam melaksanakan fungsinya sebagai perencana benar-benar memikirkan dan merumuskan dalam suatu program tujuan dan tindakan yang harus dilakukan, serta harus bertanggungjawab terhadap maju mundurnya sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah hendaknya memahami, menguasai dan mampu melaksanakan tugas kemanagerialnya dengan baik dan benar, dengan cara merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan agar organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mampu menjawab tantangan pengembangan yang terjadi di dalam Lembaga Pendidikan, yang mana manajemen pengembangan harus senantiasa dilakukan secara terus menerus.

Kepala sekolah adalah jabatan pimpinan yang tidak bisa diisi oleh orang lain tanpa didasari oleh pertimbangan-pertimbangan siapapun yang akan diangkat menjadi kepala sekolah serta ditentukan melalui proses serta persyaratan-persyaratan tertentu seperti: latar belakang pendidikan, pengalaman, usia pangkat dan integritas. Oleh karena itu, kepala sekolah pada hakikatnya adalah pejabat formal sebab pengangkatannya melalui proses dan prosedur yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang

kompleks dan unik serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai perencana dan bertanggung jawab untuk memimpin sekolah khususnya dalam mengembangkan sarana prasarana yang sudah ada di sekolah. Kepala sekolah juga dapat mengaplikasikan perencanaan, pengorganisasian dan pengelolaan kepegawaian dalam pengelolaan sekolah yang dipimpinnya, dalam mengelola tenaga pendidikan, salah satu tugas penting yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan di antaranya ialah merencanakan dan mengembangkan sarana prasarana yang ada di sekolah dalam menunjang proses pembelajaran, seperti menambah bangku siswa ketika diperlukan, memberikan fasilitas air minum di setiap kelas. Serta menjalin lingkungan yang baik dengan warga sekolah, guru, siswa, dan lingkungan SMKN 1 Kupang.

Demikianlah kepala sekolah sebagai perencana pengembangan sarana prasarana juga memperhatikan masalah-masalah sebagai berikut: 1). Peningkatan dan perluasan pemerataan layanan sarana prasarana pendidikan; 2). Peningkatan mutu dan relevansi sarana prasarana serta daya saing pendidikan; dan 3). Peningkatan tata kelola/manajemen sarana prasarana dalam layanan pendidikan.

Karena keberadaan kepala sekolah sebagai perencana pengembangan sarana prasarana, yang mana perencanaan di sini memegang peranan yang sangat strategis dalam usaha mencapai keberhasilan proses pembelajaran serta upaya pelayanan pendidikan yang ada di sekolah. Dengan demikianlah di dalam perencanaan proses yang dilakukan harus mengacu terhadap langkah-langkah yang dilaksanakan sebelumnya, di antaranya langkah-langkah tersebut adalah: 1). Penentuan tujuan; 2). Menentukan sasaran; 3). Identifikasi pilihan-pilihan; 4). Penilaian perbandingan; 5). Rencana terpilih; 6). Implementasi; dan 7). Evaluasi. Ketika langkah-langkah ini diterapkan, penentuan tujuan serta sasaran pendidikan berdasarkan terhadap analisis kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman, perlu ditentukan pilihanpilihan tindakan pengembangan berdasarkan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan ke depanya. Peran kepala sekolah sebagai pelaksana pengembangkan sarana prasarana di SMKN 1 Kupang Peranan kepala sekolah sebagai pelaksana dalam mengembangkan sarana prasarana di SMKN 1 Kupang betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik dan benar yaitu dengan melaksanakan proses belajar mengajar, kegiatan bimbingan guru, kegiatan kerjasama dengan bawahan, masyarakat dan instansi terkait, serta memiliki hubungan yang sangat

erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan pengembangan sarana prasarana lainya. Sebagai seorang pemimpin seorang kepala sekolah harus mempunyai wewenang untuk memerintahkan bawahannya, dalam hal ini untuk mencapai tujuan.

Kepala sekolah sebagai pelaksana memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan pengembangan sarana prasarana pendidikan. Keberadaan kepala sekolah yang dibantu oleh wakil kepala sekolah dan kepada urusan tata usaha melaksanakan program kerja sekolah yang meliputi di antaranya ialah bidang umum, kurikulum, kesiswaan, ketenagakerjaan, sarana prasarana, keuangan, ketatausahaan dan hubungan masyarakat.

Sebagai seorang kepala sekolah ia mempunyai peranan yang aktif dan senantiasa ikut campur tangan dalam masalah yang berkenaan dengan kebutuhan anggotanya. Pemimpin yang baik adalah seorang yang mempunyai kecenderungan untuk tidak menganggap diri sendiri sebagai seorang yang mengetahui segalanya dalam lembaga. Dan senantiasa mengambil keputusan sangat adil dan bijaksana. Dan senantiasa mengambil keputusan yang adil dan bijaksana dalam pelaksanaan pengembangan sarana prasarana, memberi motivasi pada guru yang melaksanakan tugasnya dengan benar dengan cara memberikan pedoman dan pengalaman yang baik, *responsive* terhadap kebutuhan, pembiayaan, serta transparan yang mana senantiasa meningkatkan pengembangan sarana prasarana dalam menunjang proses pembelajaran.

Kepemimpinan kepala sekolah berkaitan dengan masalah kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Perilaku kepala sekolah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan terhadap para guru, baik sebagai individu maupun kelompok. Semakin tinggi kepemimpinan yang diduduki oleh seseorang dalam organisasi, nilai dan bobot strategik dari keputusan yang diambilnya pun mengarah kepada hal-hal yang lebih operasional. Serta tugas kepala sekolah sebagai pelaksana pengembangan sarana prasarana dan mengorganisasikan semua bidang/ komponen yang ada di sekolah dalam pembagian tugas sesuai dengan keahlianya. Bidang sarana dan prasarana, yakni: 1). Pelaksanaan dan seleksi buku pegangan pendidik; 2). Layanan perpustakaan dan laboratorium; 3). Penggunaan alat

peraga; 4). Kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah; 5). Kebersihan dan keindahan kelas; dan 6). Perbaikan dan dan penyediaan kelengkapan sarana prasarana sekolah

Kualitas sarana prasarana sekolah, kualifikasi tenaga pendidik, dan kependidikan yang ada di sekolah, dan kualitas proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus menerus dilakukan minimal mencapai kualitas Sekolah Standar Nasional. Kepala sekolah yang dibantu oleh wakil kepala sekolah serta semua warga sekolah terutama bersama-sama berusaha melakukan kualitas tersebut.

Peranan kepala sekolah sebagai pengendali pertama yang menentukan kunci keberhasilan sekolah, pengembangan sarana prasarana di SMKN 1 Kupang betul-betul menerapkan pengendalian yang signifikan terhadap pengembangan sarana prasarana yang ada di sekolah dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, yang mana kualitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pengendali pengembangan sarana prasarana bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, mutlak harus bisa menerapkan kepemimpinan yang baik. Kepala sekolah adalah orang yang sangat menentukan berjalannya suatu kegiatan pengembangan sarana prasarana sekolah khususnya sesuai dengan harapan yang ditargetkan, peran dan tanggung jawabnya sangat berat dengan demikianlah diperlukan kerjasama dengan stakeholder-stakeholder yang terlibat dalam dunia pendidikan, agar mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dengan itu dalam menjalankan tugasnya seorang pemimpin sekolah, hendaknya kepala sekolah memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dan arah dalam berpijak.

Dalam menunjang kemajuan pendidikan dalam segi sarana prasarana pemerintah melimpahkan atau mengucurkan dana ke berbagai sekolah untuk dikelola oleh sekolah dan komite sekolah, akibat dari ini mulai ada kecenderungan kepala sekolah lebih memikirkan proyek dari tugas pokoknya sebagai orang yang menjalankan keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Untuk itu diharapkan agar kepala sekolah jangan sampai hilang langkah dalam mencapai visi dan misi dalam pengendali pengembangan sarana prasarana di sekolah. Di lingkungan sekolah, kepala sekolah merupakan pemimpin pengendali puncak yang menentukan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan. Pengawasan/pengendalian merupakan proses untuk mengamati secara berkesinambungan pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan perbaikan terhadap penyimpangan pengembangan sarana prasarana yang terjadi.

Untuk menjalankan fungsi ini diperlukan adanya standar kinerja yang jelas, pengawasan dan pengendalian juga merupakan alat ukur apakah implementasi sesuai dengan rencana yang merupakan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya yang mana pengendalian disini mengacu pada pemanfaatan, kualitas dan kuantitas serta efektif dan efisiennya pengendalian pengembangan sarana prasarana dalam proses pembelajaran. Kemampuan kepala sekolah yang profesional perlu terus diciptakan melalui peningkatan kemampuan aparat yang berada di sekolah dalam mengolah, menganalisis, mengembangkan dan mendayagunakan penyedia pengembangan sarana prasarana di sekolah secara efektif dan efisien. Untuk kepentingan tersebut, perlu terus dikembangkan suatu sistem informasi manajemen kepala sekolah yang bermutu agar dapat lebih meningkatkan sarana prasarana yang ada di sekolah.

Maka hasil analisis data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran kepala sekolah dalam mengembangkan sarana prasarana di sekolah yang diperlihatkan dan diterapkan oleh kepala sekolah di SMKN 1 Kupang telah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya dengan menghasilkan suatu kesimpulan sebagai berikut: Secara keseluruhan mengenai peran kepala sekolah dalam mengembangkan sarana prasarana di SMKN 1 Kupang cukup bagus, dalam keseharianya telah dapat mencerminkan pribadi yang benar-benar memajukan sebuah lembaga pendidikan khususnya di SMKN 1 Kupang, seperti: a). Meningkatnya prestasi belajar dengan bertambahnya sarana prasarana di sekolah, b). Memberikan kemajuan kepada sekolah dalam perkembanganya sarana prasarana yang ada, c). Menciptakan peserta didik lebih memahami dan menguasai alat perkembangan sarana prasarana.

Kepemimpinan komite sekolah SMKN 1 Kupang dalam pengembangan sarana dan prasarana

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa komite sekolah yang ada di SMKN 1 Kupang, telah melaksanakan perannya sebagai: (1) Badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*); (2). Pendukung (*supporting agency*); (3). Pengontrol (*controlling agency*); (4). Mediator dengan masyarakat dalam proses pengadaan sarana dan prasarana di sekolah. Peran Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, komite sekolah sering

memberikan usul dan masukan saat rapat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, juga memberikan usul-usul terkait cara yang akan dilakukan untuk mengadakan sarana dan prasarana di sekolah sampai pada proses penghapusan sarana dan prasarana. Berdasarkan hal tersebut kita dapat melihat bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pernyataan ini didukung oleh Pantjastuti (2008: 81), idealnya, sekolah dan yayasan pendidikan harus meminta pertimbangan kepada Komite Sekolah dalam merumuskan program dan kegiatan sekolah, termasuk juga dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah yang bersifat *given,* seperti di sekolah swasta dengan ciri khas tertentu. Dalam proses perencanaan pengadaaan sarana dan prasarana sekolah memang harus melibatkan komite sekolah untuk lebih mematangkan perencanaan yang dibuat, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Barnawi (2012: 51) yang mengatakan bahwa proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan hendaknya melibatkan unsur-unsur penting di sekolah seperti kepala sekolah dan wakilnya, dewan guru, kepala tata usaha dan bendahara, serta komite sekolah.

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung *(Supporting agency),* komite sekolah melaksanakan perannya dengan ikut menjadi panitia dalam proses pengadaan sarana dan prasarana, melakukan penggalangan dana dari orang tua wali murid, memberikan dukungan berupa tenaga pikiran, motivasi serta masukan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dukungan yang diberikan komite sekolah ini juga sampai pada tahap penghapusan, hal ini diwujudkan dengan ikut melakukan pemilihan barang dan pengecekan kondisi sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komite sekolah sebagai badan pendukung dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah sudah melaksanakan tugas sebagaimana yang harus dilakukan.

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung tersebut, didukung oleh pernyataan Pantjastuti (2008: 82) komite sekolah memiliki peran sebagai *supporting agency*, badan yang memberikan dukungan berupa dana, tenaga dan pikiran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 Ayat 1 juga dituliskan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi progam pendidikan melalui

dewan pendidikan dan komite sekolah. Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) komite sekolah telah melakukan pengawasan atas penggunaan dana yang dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas sekolah dengan ikut terlibat dalam penyusunan RKAS bersama kepala sekolah dan guru. Bentuk pengawasan yang diberikan oleh komite sekolah yaitu komite sekolah juga sering melakukan survey langsung datang ke sekolah untuk melakukan pengecekan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dalam penghapusan sarana dan prasarana, bentuk pengawasan yang diberikan oleh komite sekolah yaitu hadir secara langsung dalam proses penghapusan setelah sebelumnya juga ikut memilih barang atau sarana prasarana yang memang benar layak untuk dilakukan penghapusan. Dari hal tersebut, kita dapat melihat bahwa komite sekolah dalam fungsinya sebagai badan pengontrol sudah menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol tersebut didukung pernyataan dari Pantjastuti (2008: 82) yang menyatakan bahwa komite sekolah memiliki peran sebagai *controlling agency*, badan yang melaksanakan pengawasan sosial kepada sekolah. Pengawasan sosial yang dilakukan lebih memiliki implikasi sosial, dan lebih dilaksanakan secara preventif, seperti ketika sekolah menyusun RKAS, atau ketika sekolah menyusun laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Komite Sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai mediator yaitu dengan menyampaikan aspirasi terhadap program sekolah yang berasal dari masyarakat. Dalam hal pengadaan sarana dan prasarana, komite sekolah menjadi perantara dari pihak sekolah kepada masyarakat untuk menyalurkan usul dan masukan saat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan sampai pada tahap pelaporan adanya penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Jadi tidakhanya dalam bentuk materi atau dana saja yang disalurkan oleh komite sekolah dari masyarakat kepada sekolah, tetapi juga dalam bentuk ide dan gagasan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hasbullah (2007: 93) yang menyatakan bahwa komite sekolah berfungi menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002 tentang tujuan dari dibentuknya komite sekolah adalah sebagai berikut: (1). Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan oprasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2). Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta

masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan komite sekolah sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai badan pengontrol dalam usaha meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Bila dilihat dari pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa peran komite dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di SMKN 1 Kupang sebenarnya sudah maksimal. Mulai dari tahap perencanaan sarana dan prasarana hingga pada tahap penghapusan sarana dan prasarana, namun dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah komite sekolah masih mengalami kesulitan. Hal ini dapat dilihat dari sekolah yang masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar, ini disebabkan karena sekolah kurang memiliki lahan yang cukup luas untuk melakukan penambahan sarana dan prasarana. Selain itu faktor dana juga menjadi hambatan bagi komite sekolah dalam memberikan suntikan dana untuk membangun kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, hal ini disebabkan sebagian besar orang tua wali murid yang ada di sekolah ini berasal dari golongan menengah ke bawah.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni: Kepala sekolah memiliki peran yaitu memikirkan dukungan dari pihak lain sehingga, keberlanjutan selanjutnya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Peran kepala sekolah sebagai pelaksana pengembangan sarana prasarana di SMKN 1 Kupang hendaknya pandai menyediakan, merencanakan dan memfasilitasi yaitu dengan melaksanakan proses pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana, melaksanakan program kerja sekolah, kegiatan kerjasama dengan semua keluarga sekolah, masyarakat dan instansi terkait. Peran kepala sekolah sebagai pengendali pengembangan sarana dan prasarana di SMKN 1 Kupang dimana kepala sekolah merupakan pemimpin pengendali puncak yang menentukan kunci keberhasilan sekolah untuk mencapai tujuan, serta pengendalian di sekolah SMKN 1 Kupang merupakan proses untuk mengamati secara berkesinambungan pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi terhadap penyimpangan pengembangan sarana prasarana yang terjadi.

Komite sekolah yang ada di SMKN 1 Kupang berperan aktif dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah.

Saran

Kepala sekolah perlu meningkatkan pemerataan dan memperluas layanan sarana prasarana pendidikan, memikirkan dan merumuskan dalam suatu program tujuan yang dilakukan terhadap maju mundurnya sekolah. Peningkatan mutu relevansi sarana dan prasarana serta daya saing pendidikan sehingga, kepala sekolah memahami, menguasai dan mampu melaksanakan tugas kemenejerialnya dengan baik dan benar, dengan cara merencanakan, mengorganisasikan, memiliki target ke depan serta menyesuaikan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Keaktifan peran komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana hendaknya terus dipertahankan dan ditingkatkan. Meskipun banyak hambatan yang dihadapi, komite sekolah hendaknya tidak mudah menyerah dan senantiasa berusaha mencari solusi terbaik dalam mengatasi hambatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Barnawi, Mohammad Arifin. (2012). *Buku Pintar Mengelola Sekolah (Swasta),*Yogyakarta:ArRuzz

Gupta & Shingi. (2001). *Strategies for initial management of hypertension*. Indian J Med Res.132

Hasbullah. (2007). *Otonomi Pendidikan (Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap*

Penyelenggaraan Pendidikan). Jakarta: Raja Grafindo Persada

Pantjastuti, Sri Renani, dkk. (2008). *Komite Sekolah, Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Yogyakarta: Hikayat.

Salim. (2001). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif (edisi kedua, Agustus 2006), Tiara

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang (1945) Versi Amandemen. Tentang tujuan pendidikan nasional. Bandung: Fokus Media

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional dalam rangka pembedayaan dan peningkatan peran serta masyarakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 edisi 2009, Tentang Guru dan Dosen, Bandung, Depdiknas, Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 edisi 2009, Sistem Pendidikan Nasional, Bandung, Depdiknas, Citra Umbara.